

ABSTRAK

Mutiara Cristal Nim.1173060061 “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg).

Aborsi adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan bertujuan untuk menggugurkan kandungan yang tidak memiliki waktu cukup untuk bertahan hidup. Sub masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu: 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg terhadap sanksi tindak pidana pelaku aborsi? 2) bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg terhadap sanksi tindak pidana pelaku aborsi. Dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Yang mana inti dari teori *maqashid syariah* ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat. *Maqashid syariah* terkait penelitian ini yaitu *hifdzun nafs* (memelihara jiwa).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer diambil berkas putusan pengadilan negeri bandung Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg; sumber data sekunder dilihat dari buku dan referensi lain terkait penelitiannya; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini *pertama*, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan oleh aturan Perundang-Undangan dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. *Kedua*, menurut perspektif hukum pidana Islam mengenai sanksi terhadap kasus palaku yaitu *diat janin* senilai dengan lima ekor unta. Karena janin yang digugurkan oleh pelaku berusia empat bulan, ketika keluar dari dalam rahim sudah tidak bernyawa. Sedangkan menurut pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai sanksi terhadap kasus memenuhi unsur-unsur hukum tetapi dikarenakan di dalam putusan tersebut berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat khusus dan Undang-Undang Kesehatan bersifat umum.